

KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS RELOKASI PKL DI SEKITAR STATION KLENDER BARU DAN SEKITARNYA

Deradjat Mahadi Sasoko¹ Jesika Yesivani Boangmanalu²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Mahasiswa Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan strategis dalam penataan kawasan perkotaan guna menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Stasiun Klender Baru, Jakarta, dengan fokus pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi dan penelitian terdahulu. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memberikan dampak yang beragam. Dari aspek sosial, relokasi menciptakan ruang publik yang lebih tertata, namun juga menimbulkan resistensi akibat kurangnya keterlibatan PKL dalam proses perencanaan. Dari perspektif ekonomi, dampak yang dirasakan pedagang bervariasi; mereka yang memperoleh lokasi strategis mengalami peningkatan pendapatan, sementara yang ditempatkan di lokasi kurang menguntungkan menghadapi penurunan pendapatan. Dalam aspek lingkungan, kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas kebersihan dan keteraturan kawasan sekitar stasiun.

Kata Kunci: relokasi PKL, kebijakan tata kota, pembangunan berkelanjutan

Abstract

The relocation of street vendors (PKL) is a strategic policy in urban area management aimed at creating order, comfort, and supporting sustainable development. This study examines the implementation of the PKL relocation policy in the Klender Baru Station area, Jakarta, focusing on its social, economic, and environmental impacts. The approach used is a descriptive qualitative method, with primary data obtained through observations and interviews, and secondary data derived from official documents and previous studies. Triangulation techniques are applied to ensure data validity. The research findings indicate that the relocation policy has diverse impacts. From a social perspective, relocation creates a more organized public space but also generates resistance due to the lack of vendor involvement in the planning process. From an economic standpoint, the impact on vendors varies; those who obtain strategic locations experience increased income, while those placed in less advantageous locations face declining revenue. In terms of the environment, this policy has successfully improved cleanliness and orderliness in the station area.

Keywords: PKL relocation, urban planning policy, sustainable development

PENDAHULUAN

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merujuk pada pemindahan pedagang dari lokasi semula ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keadilan. KBBI (2024) Relokasi adalah proses pemindahan atau penggantian lokasi dari suatu tempat ke tempat lain. Sutrisno (2017) Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu bentuk kebijakan tata ruang kota untuk menciptakan ruang publik yang lebih terorganisasi.

Kebijakan relokasi PKL merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk menata kawasan perkotaan sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Adisasmita (2011) Penataan ruang kota melalui kebijakan relokasi PKL merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan tata kota yang terorganisir, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung pertumbuhan

© 2024 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: deradjatmahadisasoko@gmail.com

Received 31 October 2024, Accepted 04 November 2024, Published 07 November 2024

ekonomi masyarakat kecil secara lebih terorganisir. Salah satu wilayah yang menjadi fokus kebijakan ini adalah kawasan Stasiun Klender Baru dan sekitarnya, yang dikenal sebagai area dengan mobilitas tinggi dan keberadaan PKL.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan DKI Jakarta (2023), jumlah PKL di sekitar Stasiun Klender Baru mencapai 1.200 pedagang, sebagian besar belum memiliki lokasi berdagang yang permanen. Di kawasan Stasiun Klender Baru, keterbatasan fasilitas seperti tempat berjualan yang layak, akses transportasi yang memadai, dan promosi kawasan sebagai pusat ekonomi baru menjadi hambatan. Hal ini diperparah dengan kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung tidak konsisten. Akibatnya, banyak PKL yang kembali ke lokasi lama setelah relokasi, menciptakan siklus ketidak-teraturan yang terus berulang.

Selain adanya ketidakteraturan yang terus PKL, kurangnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan relokasi juga memicu resistensi dari para PKL. Pemerintah sering kali dianggap kurang melibatkan PKL dalam proses dialog untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Padahal, keterlibatan aktif para PKL dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Relokasi PKL yang direncanakan dengan baik dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan, karena mendukung keteraturan kota, meningkatkan kesejahteraan pedagang, dan menciptakan ruang publik yang lebih ramah lingkungan (Adisasmita, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan relokasi PKL di berbagai kota dengan fokus pada dampak sosial-ekonomi dan pengaruhnya terhadap pembangunan kota. Misalnya, penelitian oleh Sutrisno (2017) yang menyebutkan bahwa relokasi PKL dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pedagang, terutama apabila prosesnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pedagang itu sendiri. Pendekatan yang inklusif ini memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama mengenai lokasi relokasi yang tidak hanya strategis bagi pedagang, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan

masyarakat sekitar, sehingga menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Wijaya dan Kartika (2019) juga menyoroti dampak positif dari kebijakan relokasi PKL dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan estetika kota. Dengan mengalihkan PKL ke lokasi yang lebih terorganisir dan teratur, ruang publik menjadi lebih tertata, yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga kota. Di samping itu, penataan yang lebih baik dapat menarik lebih banyak wisatawan atau pembeli, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.

Namun, meskipun potensi positif tersebut terlihat jelas, pelaksanaan kebijakan relokasi PKL tidak jarang menemui berbagai tantangan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa relokasi seringkali menemui hambatan dalam hal komunikasi antara pemerintah dan pedagang, kurangnya fasilitas yang memadai di tempat relokasi, serta ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat terhadap pemindahan PKL. Selain itu, masalah sosial seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakmerataan kesempatan antara pedagang yang telah direlokasi dengan yang belum, juga seringkali menjadi isu yang perlu diatasi agar kebijakan tersebut dapat berhasil secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang ada sangat penting untuk memastikan kebijakan relokasi ini dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan Relokasi PKL

Kebijakan relokasi PKL melibatkan pendekatan tata kelola ruang publik dan strategi pengelolaan informalitas di kota. Kebijakan ini sering kali didasarkan pada prinsip penataan ruang, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan konflik sosial.

Dalam implementasi kebijakan relokasi, langkah-langkah utama meliputi identifikasi lokasi strategis untuk relokasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelibatan PKL dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Tahapan implementasi kebijakan relokasi di antaranya adalah:

1. Pemerintah melakukan identifikasi wilayah yang tepat untuk relokasi dengan mempertimbangkan aksesibilitas, potensi pasar, dan kelayakan infrastruktur.
2. PKL yang akan direlokasi didata secara menyeluruh. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat relokasi.
3. Lokasi relokasi dilengkapi dengan fasilitas seperti kios, sanitasi, dan akses jalan yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha PKL.
4. Setelah proses relokasi, dilakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat. Dukungan kebijakan yang konsisten serta pendekatan berbasis dialog menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses relokasi.

Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan laporan Brundtland tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam aspek ekonomi, Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus relokasi PKL, indikator keberhasilan ekonomi meliputi peningkatan pendapatan PKL di lokasi baru, stabilitas usaha, dan peluang kerja baru yang tercipta di sekitar lokasi relokasi. Evaluasi sejauh ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tergantung pada strategis atau tidaknya lokasi baru dan dukungan fasilitas seperti promosi pasar.

Dalam aspek sosial, Relokasi PKL harus mempertimbangkan harmoni sosial dengan meminimalkan konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL), masyarakat, dan pemerintah. Keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan PKL terhadap kebijakan relokasi, kemauan untuk beradaptasi, serta partisipasi aktif dalam perencanaan. Penelitian

menunjukkan bahwa relokasi yang melibatkan partisipasi PKL sejak awal cenderung menghasilkan hasil sosial yang lebih baik.

Dalam aspek lingkungan, Penataan ruang kota yang lebih baik merupakan salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan relokasi PKL dalam aspek lingkungan diukur dari berkurangnya kemacetan, peningkatan kualitas ruang publik, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Studi kasus di Stasiun Klender Baru menunjukkan bahwa relokasi PKL telah membantu mengurangi penumpukan sampah di sekitar area sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sarie *et al* 2023; Nartin *et al* 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Stasiun Klender Baru dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui observasi, melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga penelitian, atau media massa terkait lembaga ke lokasi PKL dan lokasi pembangunan Stasiun Klender (Daerah Barukawasan Stasiun Klender Baru).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi (Judijanto *et al* 2024) Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi, untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, diskusi dengan informan dilakukan secara berulang untuk memvalidasi temuan awal dan memperkaya analisis. Dengan langkah-langkah ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang kredibel dan komprehensif terkait kebijakan relokasi PKL di kawasan Stasiun Klender Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deksripsi PKL di Stasiun Klender Baru

Kawasan sekitar Stasiun Klender Baru, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat

aktivitas ekonomi informal dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Sebelum relokasi, kawasan ini menjadi tempat utama bagi para PKL untuk menjalankan kegiatan perdagangan mereka. PKL yang beroperasi di area tersebut sebagian besar menjual makanan, minuman, serta barang kebutuhan harian dengan target utama pelanggan yang terdiri dari pengguna transportasi umum, pekerja di sekitar kawasan stasiun, dan masyarakat sekitar. Lokasi ini memiliki potensi pasar yang besar karena merupakan titik pertemuan antara jalur transportasi publik dan lingkungan permukiman.

Namun, kondisi sebelum relokasi menunjukkan adanya sejumlah permasalahan serius yang memengaruhi keteraturan kawasan tersebut. Sebagian besar PKL menggunakan trotoar dan area parkir sebagai tempat berjualan, sehingga mengakibatkan penyempitan ruang untuk pejalan kaki dan pengguna jalan. Akibatnya, kawasan ini sering mengalami kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, kurangnya fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah membuat lingkungan sekitar stasiun menjadi kotor dan tidak tertata, yang mengurangi kenyamanan masyarakat umum.

Stasiun Klender Baru sendiri merupakan salah satu stasiun kereta api yang strategis di Jakarta Timur, melayani ribuan penumpang setiap hari. Lokasinya yang berada di tengah permukiman padat dan dikelilingi oleh pusat aktivitas ekonomi menjadikan kawasan ini memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah daerah melihat potensi kawasan ini sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan lebih optimal melalui kebijakan penataan ulang, termasuk relokasi PKL.

Relokasi PKL bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan bersih, sekaligus memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Lokasi baru yang disediakan pemerintah dilengkapi dengan fasilitas seperti kios permanen, akses jalan yang memadai, dan sanitasi yang lebih baik. Dengan upaya ini, diharapkan kawasan sekitar Stasiun Klender Baru tidak hanya menjadi lebih tertata secara fisik, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi para PKL dan masyarakat luas.

Penelitian ini berfokus pada dinamika yang terjadi di kawasan tersebut, baik sebelum maupun sesudah kebijakan relokasi diterapkan. Aspek-aspek seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi perhatian utama dalam memahami dampak kebijakan ini terhadap kehidupan pedagang dan masyarakat sekitar.

Implementasi Kebijakan Relokasi PKL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Stasiun Klender Baru membawa dampak yang beragam, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dari segi pelaksanaan, proses relokasi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan pedagang, sosialisasi kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung di lokasi baru, serta evaluasi pascarelokasi. Namun, beberapa tahapan ini tidak selalu berjalan lancar. Sosialisasi kebijakan sering kali dianggap kurang memadai oleh pedagang, sehingga menimbulkan resistensi pada tahap awal pelaksanaan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komunikatif dan melibatkan pedagang secara langsung dalam perencanaan relokasi.

Dampak relokasi terhadap aspek sosial cukup signifikan. Ruang publik yang sebelumnya digunakan secara tidak teratur oleh pedagang kini menjadi lebih tertata dan nyaman untuk digunakan masyarakat. Meskipun demikian, proses penyesuaian bagi pedagang di lokasi baru memerlukan waktu. Sebagian besar pedagang merasa kesulitan untuk menarik pelanggan di tempat relokasi pada awalnya, terutama karena lokasi tersebut belum sepenuhnya dikenal oleh konsumen tetap mereka. Namun, setelah beberapa waktu, sebagian pedagang melaporkan peningkatan keteraturan dan hubungan sosial yang lebih baik di lokasi baru.

Dari perspektif ekonomi, relokasi memberikan hasil yang bervariasi di antara para pedagang. Bagi pedagang yang mendapatkan lokasi relokasi strategis dengan aksesibilitas yang baik, mereka melaporkan peningkatan pendapatan karena adanya kemudahan dalam menjangkau pelanggan baru. Sebaliknya, bagi pedagang yang dipindahkan ke lokasi yang kurang strategis atau minim promosi, mereka justru mengalami penurunan pendapatan yang memengaruhi keberlanjutan usaha mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih untuk relokasi harus memenuhi kriteria strategis, seperti akses mudah bagi pembeli dan adanya fasilitas pendukung yang memadai.

Dalam aspek lingkungan, relokasi ini membawa dampak positif yang nyata. Kawasan sekitar Stasiun Klender Baru yang sebelumnya dipenuhi dengan sampah dan kemacetan akibat aktivitas PKL kini menjadi lebih bersih dan teratur. Fasilitas sanitasi yang disediakan di lokasi baru membantu dalam pengelolaan limbah, sehingga kualitas lingkungan di sekitar stasiun mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, ruang publik yang lebih tertata memberikan manfaat tidak hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menggunakan area tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Stasiun Klender Baru memberikan dampak yang beragam dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi sosial, kebijakan ini berhasil menciptakan ruang publik yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Namun, proses adaptasi bagi pedagang di lokasi baru tidak selalu berjalan mudah, terutama dalam menarik kembali pelanggan mereka. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, beberapa pedagang merasakan peningkatan keteraturan usaha serta hubungan sosial yang lebih baik di lingkungan baru mereka.

Dari perspektif ekonomi, hasil relokasi bervariasi tergantung pada lokasi strategis yang diberikan kepada pedagang. Sementara sebagian pedagang mengalami peningkatan pendapatan, yang lain justru mengalami penurunan akibat kurangnya aksesibilitas dan promosi di lokasi baru. Dari aspek lingkungan, kebijakan ini memberikan dampak positif dengan menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertata, serta didukung oleh fasilitas sanitasi yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan relokasi PKL di kawasan ini sangat bergantung pada perencanaan lokasi yang strategis, komunikasi yang efektif dengan pedagang, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, R. 2011. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*. Universitas Jayabaya. Jakarta
- Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan DKI Jakarta. 2023. *Data Pedagang Kaki Lima di Sekitar Stasiun Klender Baru*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Judijanto, L., Wibowo, G.A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A.F., Raharjo, R. and Simorangkir, F.M.A., 2024. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nartin, S.E., Faturrahman, S.E., Ak, M., Deni, H.A., MM, C., Santoso, Y.H., SE, S., Paharuddin, S.T., Suacana, I.W.G., Indrayani, E. and Utama, F.Y., 2024. *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nugroho, A. 2003. Pengertian dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ekonomi Informal*, 1(1), pp. 14-20.
- Sarie, F., Sutaguna, I.N.T., Par, S.S., Par, M., Suiraoaka, I.P., St, S., Darwin Damanik, S.E., Se, M., Efrina, G., Sari, R. and Nengsi, A.R., 2023. *Metodelogi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sinambela, R. 2008. Usaha Sektor Informal dan Peranannya dalam Perekonomian. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), pp. 12-18.
- Sutrisno, A. 2017. Dampak Sosial-Ekonomi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), pp. 45-56.
- Tim penyusun KBBI. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Wijaya, H., and Kartika, S. 2019. Dampak Relokasi PKL terhadap Estetika dan Kemacetan Kota. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 4(1), pp. 23-34.